

**TUGAS AKHIR**

**ANALISA KEDUDUKAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERUTANG  
PADA WAJIB PAJAK BADAN  
DI PT. DELIMA MAKMUR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya  
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**RENI SAFITRI**  
**00976008863**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU**

**2012**

## **ABSTRAK**

# **ANALISA KEDUDUKAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERUTANG PADA WAJIB PAJAK BADAN DI PT. DELIMA MAKMUR**

***Oleh : Reni Safitri***

*Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Delima Makmur yang berlokasi di jalan Putri Hijau Dalam Nomor 4 C – G Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kedudukan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan (PPH) terutang pada wajib pajak badan di PT. Delima Makmur.*

*Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh dari PT. Delima Makmur, dan melakukan wawancara kepada para karyawan bagian keuangan serta melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan lain-lain.*

*zakat dalam perhitungan pajak penghasilan (PPH) terutang, tidak semua dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang, hanya zakat yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang pendiriannya disetujui oleh pemerintah dapat diakui sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.*

*Berdasarkan hasil penelitian, PT. Delima Makmur merupakan salah satu badan yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dengan penghasilan yang telah mencapai nishab untuk dikenai zakat sehingga zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi dapat diakui sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.*

*Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak terutang telah berjalan cukup baik. Dan PT. Delima Makmur sebagai salah satu perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan membayar zakat serta kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak.*

*( kata kunci : kedudukan zakat, perhitungan, pajak penghasilan terutang, wajib pajak badan)*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka Tugas Akhir yang berjudul “*Analisa Kedudukan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Delima Makmur*” ini bisa selesai seperti apa yang kita harapkan.

Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor dan peletak utama dasar-dasar terdirinya suatu pemerintahan Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik.

Dalam menyelesaikan dan melaksanakan penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan yang terdapat pada penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran serta bimbingan yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan ini.

Sebagai makhluk sosial, Penulis tentu tidak dapat menulis skripsi ini tanpa dukungan dan bantuan semua pihak, baik langsung ataupun tidak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Syafrizal dan Bunda Wati yang tidak pernah bosan untuk mendidik, mencintai, menyayangi dan memberi nasehat kepada penulis,

semoga kasih sayang dan pengorbanan Ayanda dan Bunda akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan ditempatkan disurga Jannatunaim.

2. Buat kakanda tersayang Dedi Qurniawan dan Rahmi Yusnita serta Adinda terkasih Reza Saputra dan Irfan Aryadi, terima kasih atas dukungan dan supportnya yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
3. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU serta barisan Purek I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dikampus yang tercinta ini.
4. Bapak selaku Dekan Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec dan Pudek I,II dan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Mahmuzar M.Hum, selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan, Penasehat Akademis serta Pembimbing dan Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku sekretaris jurusan.
6. Bapak / Ibu Dosen terutama bapak / ibu dosen jurusan Administrasi Perpajakan serta karyawan/ti UIN SUSKA RIAU.
7. Seluruh karyawan/ti PT. Delima Makmur yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Terima kasih untuk rekan-rekan Jurusan Administrasi perpajakan Angkatan 2009 khususnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya kritik dan saran untuk peningkatan kualitas Tugas Akhir ini sangat diharapkan, semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai masyarakat luas.

Pekanbaru, April 2012

Penulis

**RENI SAFITRI**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Metode Penulisan.....	11
F. Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II : GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat .....	13
B. Struktur Organisasi.....	15
C. Uraian tugas.....	16

### BAB III : TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Teori .....	19
1. Pengertian zakat .....	19
1.1 Harta yang dikenakan zakat.....	19

1.2. Tujuan zakat.....	20
1.3 Orang yang berhak menerima zakat .....	21
2. Pengertian pajak .....	22
2.1. Fungsi Pajak .....	22
2.2. Jenis-jenis pajak.....	23
2.3. Pengertian Penghasilan.....	25
2.4. Pengertian pajak penghasilan .....	25
2.4.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 21.....	26
2.4.2 Pengertian pajak penghasilan pasal 22 .....	26
2.4.3 Pengertian pajak penghasilan pasal 23 .....	26
2.4.4 Pengertian pajak penghasilan pasal 24 .....	27
2.4.5 Pengertian pajak penghasilan pasal 25.....	27
2.4.5 Pengertian pajak penghasilan pasal 26 .....	27
2.4.5 Pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 .....	28
2.5. Pengertian pajak terutang.....	28
2.6. Pengertian wajib pajak badan .....	28
2.6.1 Pengertian wajib pajak .....	28
2.6.2 Pengertian badan.....	29
2.7 hal-hal yang dibolehkan atau tidak sebagai pengurang ...	29
3. Pandangan Islam Tentang Pajak .....	33
B. Tinjauan Praktek .....	37
1. kedudukan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan di PT. Delima makmur .....	37

#### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	41

#### DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Seorang pemeluk agama Islam memiliki kewajiban membayar zakat dimana ia harus menyisihkan sebagian harta atau penghasilannya yang telah mencapai nisab tersebut. Kemudian, harta yang telah dikeluarkan itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara itu ia juga memiliki kewajiban yang diberikan kepada Negara yang namanya pajak. Sehingga tanpa disadari zakat memiliki posisi tersendiri sebagai pengurang dalam penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang kepada Negara oleh Wajib Pajak yang beragama Islam.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada Tahun 2008 ini menyatakan segala yang berkaitan dengan pajak penghasilan diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa :

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, tidak boleh dikurangkan antara lain harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m

serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Jadi, zakat sebenarnya termasuk dalam kelompok pengeluaran berupa bantuan atau sumbangan yang sebenarnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh terutang. Kemudian ditegaskan bahwa zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah, dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Di Indonesia dasar dari Peraturan yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, maka bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah setoran Pajak Penghasilan seperti yang terdapat dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 dinyatakan: Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-6/PJ/2011 yang mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan ini mulai wajib diberlakukan sejak 21 Maret 2011 sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-6/PJ/2011. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-163/PJ/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-6/PJ/2011 disebutkan, zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Jadi, berdasarkan pasal 1 huruf a dan b Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-6/PJ/2011 zakat yang dapat dikurangkan harus memenuhi semua syarat berikut :

- a. Zakatnya berupa zakat atas penghasilan. Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat maal, zakat perniagaan, zakat profesi dan lain-lain. tidak dikenal istilah zakat penghasilan dalam khasanah fiqih Islam. Adapun yang dimaksud dengan zakat atas penghasilan adalah zakat profesi yang merupakan zakat yang merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer. Sebagaimana diketahui, zakat profesi dikenakan terhadap penghasilan orang sebagai karyawan, pegawai atau professional.
- b. Dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
- c. Dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

Namun, ada ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak sebagai bukti bahwa pembayaran zakat memang benar telah dilakukan wajib pajak antara lain:

- a. Nama lengkap Wajib pajak dan NPWP pembayar;
- b. Jumlah pembayaran;
- c. Tanggal pembayaran;
- d. Nama Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

- e. Tanda tangan petugas Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;
- f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Setelah persyaratan ada beberapa tahapan yang akan dijadikan sebagai pengurang pajak antara lain :

- a. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan;
- b. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Selain itu, ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib namun tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu :

- a. Tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada Badan Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- b. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan.

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tempat wajib pajak orang pribadi membayar zakat adalah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Contohnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memang dibentuk oleh pemerintah. Ada juga yang lain misalnya Rumah Zakat yang disahkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat

Apabila pengeluaran untuk zakat tidak dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Walaupun zakat bisa dijadikan pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan. Namun, tetap saja dalam prakteknya zakat sebagai pengurang pajak belum mampu memberikan dampak secara signifikan dikarenakan masyarakat tidak termotivasi untuk melaporkan zakat yang telah dibayarkan tersebut ke kantor pelayanan pajak karena dampak zakat sebagai pengurang pajak relatif kecil.

Sebenarnya jika kita tinjau secara teliti dengan wajib pajak membayar zakat maka, wajib pajak akan diuntungkan karena bisa menghemat jumlah pajak yang akan dibayarkan dan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan pajak sesuai jumlah potongan dari sisi zakat. dan juga jika jumlah WP yang beragama Islam (yang berpotensi membayar zakat) diperhitungkan. BAZ dan LAZ hanya akan diuntungkan ketika jumlah pembayar zakat meningkat karena adanya

insentif zakat sebagai Kredit Pajak. Akan tetapi jika tidak ada peningkatan jumlah pembayar zakat, maka kebijakan zakat sebagai Kredit Pajak ini hanya akan menguntungkan WP dan merugikan penerimaan negara.

PT. Delima Makmur Medan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang mengolah sendiri hasil dari hasil perkebunan sawit tersebut menjadi minyak sawit. Disamping melakukan usaha dibidang perkebunan dan perminyakan PT. Delima Makmur juga menyisihkan sedikit labanya untuk memenuhi kewajiban nya sebagai warga negara dengan membayar pajak dan zakat.

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, atau pun jasa yang dikelola secara pribadi maupun badan usaha nishabnya adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni pada akhir tahun maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %. Pada badan usaha, jika anggota terdapat anggota non muslim, zakat yang dikeluarkan dari anggota muslim saja.

berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul “Analisa Kedudukan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Pada Wajib Pajak Badan di PT. Delima Makmur”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka untuk memperjelas permasalahan yang dikemukakan diatas penulis mencoba merumuskan masalah dalam pertanyaan adalah sebagai berikut :

**“Bagaimana kedudukan zakat dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada wajib pajak badan di PT. Delima Makmur?”.**

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan.
- b. Untuk mengetahui apakah zakat sudah dimasukkan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang pada wajib pajak badan.

### **2. Manfaat Penulisan**

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi :

#### **1. Penulis**

- a. Untuk penulis diharapkan dapat membandingkan antara konsep-konsep yang telah dipelajari dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan peranan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan.



- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis.

## 2. Perusahaan

- a. Untuk perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sebagai salah satu pijakan untuk pengambilan keputusan yang ada dalam perhitungan pajak terutama keberadaan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak.
- b. Dapat memberikan perbaikan kepada perusahaan agar lebih meningkatkan lagi kinerja perusahaan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan.

## 3. Akademik

- a. Untuk akademik diharapkan dapat menambah referensi di bidang peranan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan.
- b. Dapat dijadikan rujukan dan bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Delima Makmur Jl. Putri Hijau Dalam, No.4 C-G Medan

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan lebih kurang dalam jangka waktu 3 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Maret

### **3. Jenis Data**

Adapun jenis data yang dilaksanakan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi, wawancara, dengan bagian keuangan dan perpajakan pada perusahaan PT. Delima Makmur.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti seperti buku, dokumen ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara / interview yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung dengan responden atau narasumber . Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang sifatnya sebagai penunjang studi dalam mempertajam permasalahan.
- b. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yaitu dengan melihat dan menganalisis dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. METODE PENULISAN**

- a. Metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.
- b. Metode Kualitataif, yaitu data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka atau tidak menggunakan statistik.

## **F. ANALISIS DATA**

Setelah data diperoleh dari perusahaan tempat peneliti melakukan penelitian dan tersusun secara sistematis langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mengadakan analisis, dimana dalam hal ini peneliti menggunakan *pendekatan kualitatif* yaitu sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR**

Untuk memudahkan pemahaman peneliti melakukan sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PT. DELIMA MAKMUR**

Pada bab ini akan dijelaskan lokasi penelitian yang berisikan Sejarah Singkat Berdirinya PT. Delima Makmur, struktur organisasi, dan uraian tugas pada PT. Delima Makmur.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan. Bagian ini terdiri dari pengertian analisa, pengertian zakat, pengertian pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, pengertian pajak penghasilan pasal 22, pengertian pajak penghasilan pasal 23, pengertian pajak penghasilan pasal 24, pengertian pajak penghasilan pasal 25, pengertian pajak penghasilan pasal 26, pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pengertian wajib pajak dan pengertian badan. Selain itu, dalam bab ini diuraikan juga tinjauan praktek mengenai kedudukan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan dalam prakteknya dilapangan atau kenyataannya dalam dunia usaha.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari data yang telah dilakukan, implikasi penelitian dan saran sehubungan dengan penulisan penelitian ini.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Delima Makmur**

PT. Delima Makmur yang berada di Jalan Putri Hijau Dalam No. 4 C–G, Medan. Berdiri pada Tanggal 2 Maret 1987 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-6555 H.T.01.01 Tahun 1987. Setelah berdiri Tanggal 2 Maret 1987 perusahaan ini memulai aktivitas perkebunan pada pertengahan Tahun 1994 dengan kepemilikan area perkebunan kira-kira 15.625 hektar dan hanya sekitar 9.083 hektar yang ditanami dengan pohon sawit, selain itu untuk mengelola komoditi kelapa sawit PT. Delima Makmur juga memiliki penggilingan minyak sawit yang mampu menghasilkan 30 Ton/jam. Dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit yang diperoleh dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan berlangsung. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti kelapa sawit perusahaan memiliki pabrik palm kernel oil yang menghasilkan olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKO).

PT. Delima Makmur terletak di Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Selain mengolah perkebunan sawit PT. Delima Makmur juga menghasilkan CPO.

Setelah semua hasil dari komoditi kelapa sawit selesai diolah, semua hasil produksi tersebut akan dijual kepasar lokal maupun akan di ekspor guna untuk

meningkatkan dan mendukung pemasaran dari hasil olahan komoditi kelapa sawit tersebut.

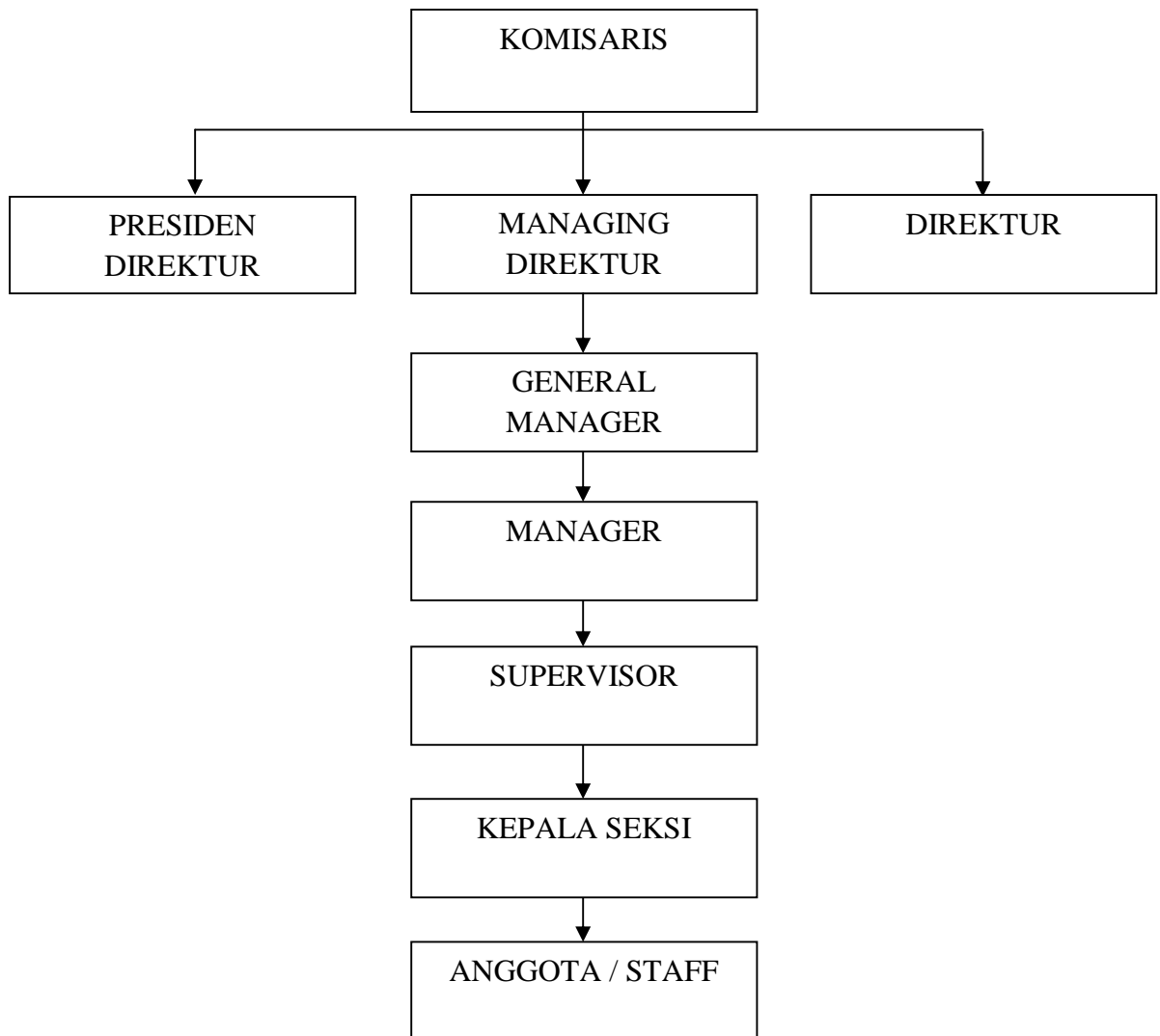
PT. Delima Makmur memiliki aktivitas perkebunan menghasilkan CPO untuk satu minggu mencapai lebih kurang 21.000 Liter. Dan untuk satu bulan PT. Delima Makmur mampu menghasilkan lebih kurang 84.000 Liter CPO.

Direktur eksekutif bertanggung jawab untuk kegiatan operasional, selain itu sekitar 95% kepemilikan PT. Delima Makmur dimiliki oleh IBRAHIM RISJAD. Pada tanggal 26 Juni 2008, perusahaan telah dihadiahi untuk suatu kategori nol kecelakaan oleh Gubernur Nangroe Aceh Darussalam untuk prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam keselamatan kecelakaan kerja.

## B. STRUKTUR ORGANISASI PT. DELIMA MAKMUR

Struktur organisasi PT. Delima Makmur dapat dilihat pada gambar II.1 yang terdapat dibawah ini :

**Gambar II.1 Struktur organisasi PT. Delima Makmur**



*Sumber : PT.Delima Makmur.*



### **C. URAIAN TUGAS PT.DELIMA MAKMUR**

Dalam suatu perusahaan sudah pasti memiliki susunan organisasi yang memiliki tugas serta fungsi tersendiri, berikut adalah fungsi serta tugas dalam struktur organisasi dalam perusahaan perkebunan sawit yang terdapat pada PT.Delima Makmur secara berurutan dari tingkatan tertinggi hingga terendah :

#### **a. Komisaris (owner)**

Komisaris merupakan pemilik dari perusahaan, dalam suatu perseroan atau perusahaan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan/ atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Komisaris memiliki kedudukan pertama yang mempunyai bagian dibawahnya seperti Presiden Direktur, Managing Direktur. Dalam bagian perusahaan, terbagi lagi sebuah General Manager dan Manager. Pada level berikutnya terdiri Supervisor dan anggota.

#### **b. Presiden direktur**

Bertugas mengepalai semua prosedur yang berjalan dalam suatu Perusahaan.

**c. Managing direktur**

Yang bekerja untuk mengatur berjalannya suatu pelaksana yang akan dirinci seperti misalnya sebuah kerja sama yang akan dilakukan kedalam perusahaan lain. Dalam suatu bagian-bagian terpenting yang terstruktur seorang managing direktur memiliki sebuah sekretaris yang akan membantu dan mempresentasikan suatu proyek yang akan dikerjakan.

**d. Direktur**

Memiliki peranan memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan.

**e. General manager**

Orangnya harus bisa mengatur suatu pekerjaan dan harus bisa juga mengevaluasi pekerjaan yang sudah selesai. Orang yang menduduki posisi general manager adalah orang yang mempunyai wawasan yang cukup luas baik itu dalam pekerjaannya sendiri maupun diluar pekerjaannya antara lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang akan datang tentunya.

**f. Manager**

Adalah sebagai pemegang tampuk kepemimpinan dalam suatu perusahaan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasi, meningkatkan efektivitas kerja karyawan/pegawai dengan memberikan contoh ataupun sebuah arahan yang baik serta mempunyai gaya yang produktif.

**g. Supervisor**

Berfungsi sebagai mengawasi atau mengamati suatu kegiatan yang dijalankan dalam sebuah perusahaan. Seorang Supervisor tidak berwenang untuk mengatur yang ada dalam perusahaan.

**h. Kepala seksi/bagian**

Berfungsi menjalankan segala aktifitas dalam perusahaan.

**i. Anggota atau staff**

Berfungsi melakukan segala aktifitas yang dilaksanakan perusahaan melalui arahan atasan.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

##### **A. Tinjauan Teori**

###### **1. Pengertian Zakat**

Perkataan zakat berasal dari bahasa arab yaitu dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam alquran adalah “suci dari dosa”

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang harus dikeluarkan oleh umat muslim apabila harta yang telah dimiliki mencapai nisab dimana harta yang telah dikeluarkan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

###### **1. 1 Harta yang dikenakan Zakat**

Harta yang dikenakan zakat adalah: Harta:

1. Emas, perak dan uang (kecuali; tambahan harta yang bersumber dari penghasilan);
2. Rikaz (harta yang dipendam/tersimpan). Penghasilan:
3. Perdagangan dan perusahaan;
4. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
5. Hasil pertambangan;
6. Hasil peternakan;
7. Hasil pendapatan dan jasa.

## **1. 2 Tujuan Zakat**

Tujuan zakat secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyucikan harta dan jiwa muzzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.

11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

### **1.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan, yaitu:

1. Fakir yaitu orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan
2. miskin yaitu orang yang tidak berdaya secara ekonomi
3. amil
4. muallaf atau orang kafir yang masuk islam
5. riqab
6. Gharim
7. Sabilillah
8. ibnussabil

## **2. Pengertian Pajak**

Menurut Azhari. (2007: 3) pajak adalah : “ Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Selain itu Azhari (2007: 4) juga menyebutkan pengertian pajak menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan yaitu UU Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1 Fungsi Pajak**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungsi Budgetaire (Anggaran) Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

## 2.2 Jenis-Jenis Pajak

jenis pajak di indonesia tergolong beberapa kelompok antara lain :

a. Berdasarkan pihak yang menanggung

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung terdiri dari :

1. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri pembayarannya oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : PPh, PBB

2. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat ditanggung pembayarannya oleh pihak lain selain wajib pajak

Contoh : pajak penjualan, bea materai dan cukai, PPN, PPnBM

b. Berdasarkan pihak yang memungut

Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut terdiri dari :

1. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan Barang yang Tergolong Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f. Bea Meterai



2. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain :

a. Propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor (baik di darat maupun diatas air)
2. Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (baik di darat maupun diatas air)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Kabupaten

1. Pajak Hotel
2. Pajak Reklame
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

c. Berdasarkan sifat

Jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari :

- a. **Pajak Subjektif**, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : PPh.

- b. **Pajak Objektif**, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

### **2. 3 Pengertian Penghasilan**

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2005: 20) dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPh 2000 “Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun”.

### **2. 4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti, (2005: 20) Pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.

#### **2 4. 1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2008: 158) ketentuan pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

#### **2 4. 2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Menurut Abakin (2008: 77) pajak penghasilan pasal 22 adalah “pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain”.

#### **2 4. 3 Pengertian pajak penghasilan pasal 23**

Menurut Abakin (2008: 87) pajak penghasilan pasal 23 adalah “pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

#### **2 4. 4 Pengertian pajak penghasilan pasal 24**

Menurut Mardiasmo (2008: 226) pajak penghasilan pasal 24 adalah “pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri”.

#### **2 4. 5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25**

Menurut Mardiasmo (2008: 235) pajak penghasilan pasal 25 adalah “pajak penghasilan yang menghitung besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan”.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24).

#### **2 4. 6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26**

Menurut Mardiasmo (2008: 248) pajak penghasilan pasal 26 adalah “pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber di indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap”.

#### **2 4. 7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2**

Menurut Mardiasmo (2008: 252) dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang pajak penghasilan menyebutkan, bahwa:

“atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.”

#### **2.5. Pengertian Pajak Terutang**

Menurut Azhari (2007: 9) pajak terutang adalah “pajak yang harus dibayar dimana jumlahnya dapat diketahui setelah akhir tahun pajak yaitu dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dikurangi biaya yang diperbolehkan.”

#### **2.6 Pengertian Wajib Pajak Badan**

##### **2.6.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2008: 21) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.6.2 Pengertian Badan**

Menurut Mardiasmo (2008: 21) badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

### **2.7 Hal-Hal Yang Dibolehkan Sebagai Pengurang**

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 dalam perhitungan pajak penghasilan ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pengurang, dan ada juga beberapa hal yang tidak boleh sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan :

#### **1. Hal-Hal Yang Boleh Dijadikan Sebagai Pengurang Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan.**

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan

- saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya,

**2. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Pengurang Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan.**

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- c. warisan;

- d.** harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e.** penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f.** pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g.** dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

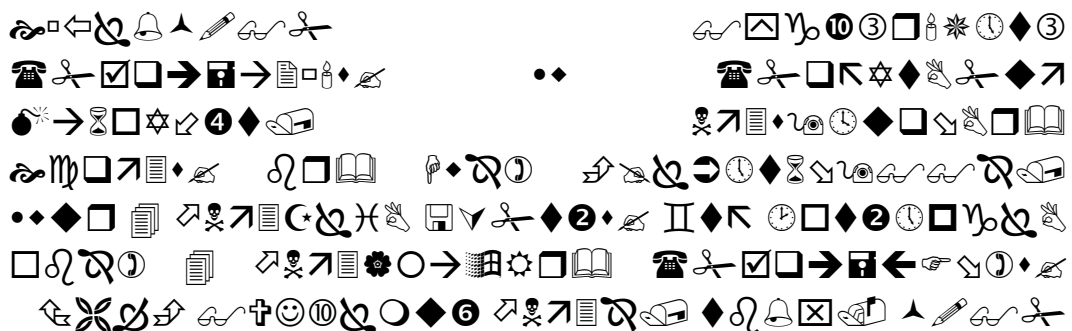


- h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- dan.
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 3. Pandangan Islam Terhadap Pajak

Dalam Islam, pajak merupakan hal yang sangat diharamkan, banyak para ulama yang mengatakan bahwa pajak merupakan bentuk kezaliman yang ada di tanah air kita ini. Dalam Surat An-Nisa di jelaskan :

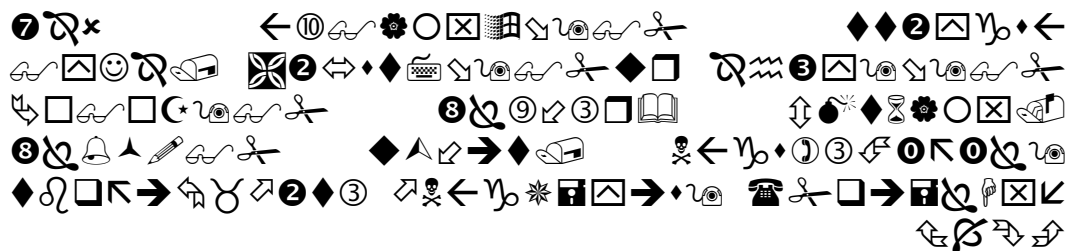


“ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil.....” (An-nisa: 29)

Menurut ayat diatas Allah S.W.T melarang hamba-NYA saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak merupakan salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesama.

Imam Nawawi rahimahumullah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad S.A.W dalam sebuah hadis bersabda dimana dalam hadis tersebut memiliki beberapa hikmah diantaranya dikatakan : bahwasannya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini dikarenakan pelakunya akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali diakhirat kelak.

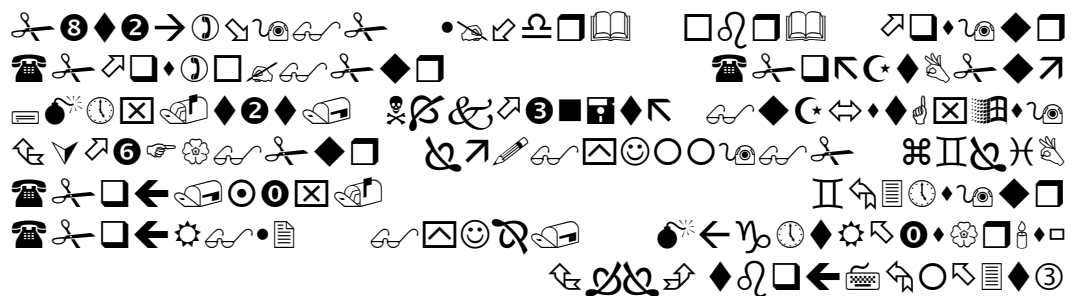
Setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Memang, pajak termasuk kezhaliman yang nyata. Akan tetapi, kezhaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya gugur ataupun batal, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan.



kemiskinan, kelemahan, musibah yang silih berganti, kekalahan, kehinaan, dan lainnya ; di antara sebabnya yang terbesar tidak lain ialah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. [Ar-Rum : 41]

Di antara manusia ada yang terheran-heran ketika dikatakan pajak adalah haram dan sebuah kezhaliman nyata. Mereka mengatakan mustahil suatu negara akan berjalan tanpa pajak.

Sebenarnya Allah telah menjanjikan bagi penduduk negeri yang mau beriman dan bertaqwa (yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya), mereka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebaikan hidup mereka di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, sebagaimana Allah berfirman.



“Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan beramal shalih, niscaya Kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan (tidak mau beriman dan beramal shalih), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” [Al-A’raf : 96]

Ketergantungan kepada pajak, merupakan salah satu akibat dari pelanggaran ayat di atas, sehingga kita disiksa dengan pajak itu sendiri. Salah satu

bukti kita melanggar ayat di atas adalah betapa banyak di kalangan kita yang tidak membayar zakatnya terutama zakat mal. Ini adalah sebuah pelanggaran. Belum terhitung pelanggaran-pelanggaran lain, baik yang nampak atau yang samar.

Kalau manusia mau beriman dan beramal shalih dengan menjalankan semua perintah (di antaranya membayar zakat sebagaimana mestinya) dan menjauhi segala laranganNya (di antaranya menanggalkan beban pajak atas kaum muslimin), niscaya Allah akan berikan janji-Nya yaitu keberkahan yang turun dari langit dan dari bumi.

## **B. Tinjauan Praktek**

### **1. Kedudukan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)**

#### **Terutang Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Delima Makmur**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bagi setiap Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara guna memenuhi kebutuhan negara dalam membayar kebutuhan rumah tangga negara, dimana timbal balik dari pembayaran pajak kepada negara ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masing-masing individu.

Sesuai dengan kebijakan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa guna penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan pemerintah membuat kebijakan bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pada pajak penghasilan terutang.

Walau demikian, tidak semua zakat dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 ini, zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Jadi zakat yang akan dijadikan sebagai pengurang harus memenuhi ketentuan berikut ini :

- 1 Berupa zakat penghasilan
2. Dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
3. Dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan atau dibentuk oleh pemerintah.

Salah satu badan yang memenuhi persyaratan diatas adalah PT. Delima Makmur yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran dari hasil olahan kelapa sawit maka, sesuai dengan ketentuan Islam diperuntukkan untuk membayar zakat mal (harta) yang tergolong kedalam kategori zakat perniagaan yaitu semua yang untuk diperjual belikan dalam berbagai jenis baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain sebagainya.

Dalam perhitungan kadar zakatnya, zakat perniagaan nishabnya adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Artinya, pada akhir tahun atau pada tutup buku PT. Delima Makmur memiliki kekayaan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni. Misalnya per gram Rp. 500.000,- X 85 gram = Rp. 42.500.000,- maka PT. Delima Makmur harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Sebelum pembayaran zakat dilakukan, PT. Delima Makmur harus memperhatikan terlebih dahulu jumlah penghasilan dari pembukuan di akhir tahun pada satu periode. Apabila sudah diketahui jumlah penghasilan yang di peroleh PT. Delima Makmur barulah diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh PT. Delima Makmur pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang

telah di sahkan oleh pemerintah sehingga zakat yang telah dibayarkan PT. Delima Makmur dapat diakui sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dibayarkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara.

Sesuai dengan pembukuan PT. Delima Makmur yang memiliki target penghasilan perhari yaitu mencapai Rp. 3 Miliar dari penjualan hasil CPO sehingga penghasilan PT. Delima Makmur lebih kurang mencapai RP. 3,2 TRILIUN sehingga dalam pembayaran zakat PT. Delima Makmur harus membayar :

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan} &: \text{Rp. } 3.200.000.000.000 \\ \text{Zakat (2,5\% x Penghasilan)} &: = 2,5\% \times \text{Rp. } 3.200.000.000.000 \\ &: = \text{Rp } 80.000.000.000\end{aligned}$$

Jadi, PT. Delima Makmur setiap tahunnya harus menyetor zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang diakui kedudukannya oleh negara sebesar Rp. 80.000.000.000,- sedangkan pada saat pembayaran zakat ini dimasukkan dalam perhitungan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang perhitungan yang diperoleh sebagai berikut :

Penghasilan bruto	Rp. 3.200.000.000.000,-
Zakat (2,5% x penghasilan)	<u>Rp. (80.000.000.000,-)</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 3.120.000.000.000,-
Pajak terutang (50% x 25% x PKP)	Rp. 390.000.000.000,-

Sedangkan apabila tidak ada zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan tentu saja PT. Delima Makmur akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar yaitu sebagai berikut :



Penghasilan Rp. 3.200.000.000.000,-

Pajak terutang (50% x 25% x PKP) Rp. 400.000.000.000,-

Apabila kita bandingkan antara perhitungan pajak setelah dijadikan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dengan perhitungan pajak tanpa memasukkan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang sangat berbeda jauh, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak (WP) diuntungkan karena bisa lebih menghemat jumlah pajak yang akan dibayarkan, sedangkan pemerintah dirugikan karena ada potensi penerimaan pajak yang hilang. Besarnya potensi pajak yang hilang berkisar antara 2,5% sampai dengan 5% karena adanya lapisan tarif progresif untuk tingkat penghasilan yang berbeda. Dilihat dari sisi Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik swasta, mereka tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan diakuinya zakat sebagai biaya yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak. BAZ dan LAZ akan diuntungkan ketika jumlah pembayar zakat meningkat karena adanya insentif tersebut. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal dimana pemerintah merelakan berkurangnya sebagian kecil penerimaan negara untuk menggiatkan perekonomian di sektor zakat.

Dalam memenuhi perannya sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan, setiap melaporkan jumlah pajak terutangnya PT. Delima Makmur juga melampirkan syarat-syarat yang menjadi bukti bahwa PT. Delima Makmur benar telah melakukan pembayaran zakat, untuk mengakui zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang tidaklah mudah karena harus memenuhi

syarat-syarat yang dilampirkan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-6/PJ/2011 antara lain :

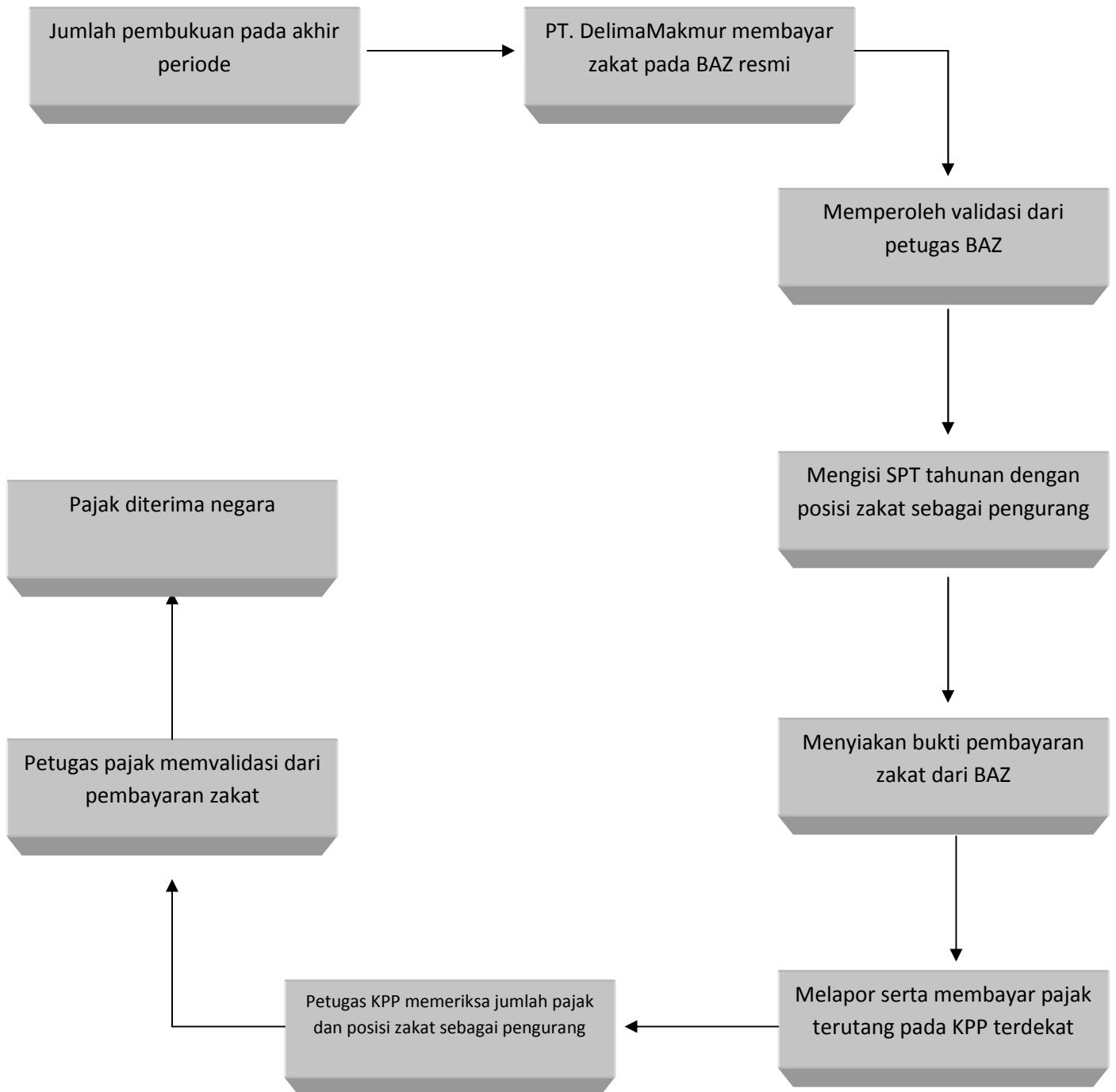
- a. Nama lengkap Wajib pajak dan NPWP pembayar;
- b. Jumlah pembayaran;
- c. Tanggal pembayaran;
- d. Nama Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- e. Tanda tangan petugas Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;
- f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi selanjutnya PT. Delima Makmur melakukan tahap berikutnya yaitu :

1. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan;

2. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

**Gambar II.2 : Bagan pembayaran pajak dengan pengakuan zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak terutang.**



*Sumber : hasil olahan sendiri dari penelitian*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dan pembahasan masalah yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kedudukan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan terutang, telah berjalan cukup baik. Berbicara tentang dilegalkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa guna penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan pemerintah membuat kebijakan bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pada pajak penghasilan terutang. Dan pada prinsipnya PT. Delima Makmur sudah melaksanakan kebijakan pemerintah ini dengan baik, namun lain halnya dengan perusahaan lain yang dimiliki oleh warga negara indonesia yang beragama Islam dimana dalam prakteknya pelaksanaan dalam perhitungan masih jauh dari apa yang diinginkan. Serta jumlah kesadaran dalam pembayaran zakat masih belum mampu menandingi dari jumlah pajak.

Apabila kita perhatikan sesuai dengan fenomena yang terjadi di kehidupan umum. Sebagai wajib pajak apabila kita cermati dengan adanya pengakuan dari negara kalau zakat sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan terutang tentu saja wajib pajak akan diuntungkan, dari sisi pajak kita

akan dikurangkan dalam jumlah pembayarannya ke kas negara. Sedangkan penerimaan dari sektor zakat akan bertambah sehingga umat islam yang berhak menerima zakat dapat terpenuhi haknya.

Zakat bisa diakui sebagai objek pajak apabila zakat tersebut dibayarkan oleh wajib pajak dimana dalam hal ini zakat yang dibayarkan oleh PT.Delima makmur yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dengan syarat-syarat tertentu sehingga zakat yang telah dibayarkan baru bisa diakui sebagai objek pajak. Tapi, apabila zakat yang dibayarkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Maka, zakat yang dibayarkan tersebut tidak bisa diakui sebagai objek pajak

## **B. SARAN**

Sebaiknya bagi PT. Delima makmur harus memperhatikan jumlah penghasilan pada akhir periode sehingga dapat diperhatikan jumlah zakat yang harus dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dan PT. Delima Makmur terhindar dari penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagi pihak yang bertanggung jawab dengan pembayaran zakat dan pembayaran pajak hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang menjadi pertimbangan dalam pengakuan zakat sebagai pengurang sehingga zakat yang telah dibayarkan dapat diakui sebagai pengurang dan pembayaran pajak.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abakin.. *Pajak penghasilan potong pungut pasal 21, 22, dan 23*. Pekanbaru: Multi Riwardsana. 2008
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Riau : Pusat Pengembangan Pendidikan Unv, 2007
- Azhari, *Perpajakan I (Pajak Penghasilan)*, Riau : pusat pengembangan pendidikan Unv, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke-4.
- Djuanda, gustian dan aji sugiarto dan irwansyah lubis dan rudi bambang trisilo dan mansyur ma'mun dan chalid. *Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=66>. Diakses tanggal 25 Desember 2011.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/analisis> diakses tanggal 25 desember 2011
- [http://carapedia.com/pengertian-definisi-analisis-info\\_2056.html](http://carapedia.com/pengertian-definisi-analisis-info_2056.html) diakses tanggal 28 Desember 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan*, yogyakarta : CV. Andi Offset,Ed. 2008
- Nur tanjung, bahdin dan ardial. *Pedoman penulisan karya ilmiah (proposal, skripsi, dan tesis)*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group. 2005
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-33/PJ/2011. Tentang Badan/Lembaga Yang Disahkan Oleh Pemerintah Sebagai Penerima Zakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang zakat

Woro damayanti, theresia dan supramono. *Perpajakan Indonesia (mekanisme dan perhitungan)*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.